

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN KENDAL

Dina Damayanti, S.Sos, M.A.
Dosen Administrasi Bisnis
DinaDSenadi@ymail.com

ABSTRAKSI

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena asas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dekan Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Nebraska Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut semua anggota diperlakukan secara adil, didukung administrasi yang canggih, koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat, manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis, keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang, pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan. Dari penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana peran pemerintah daerah dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal ? (2). Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sumber data, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan target adalah individu yang bekerja atau masih menjalin hubungan (interaksi) dengan pegawai-pegawai birokrasi sektor pelayanan publik golongan menengah ke bawah. Adapun dalam penelitian ini informannya adalah gerakan koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian : (1). Keberhasilan koperasi di dalam melaksanakan peranannya perlu memperhatikan kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modal, dengan cara pemupukan pelbagai sumber keuangan dari sejumlah besar anggota, pengaruh dari koperasi terhadap anggota-anggotanya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan. Sedangkan faktor – faktor yang menghambat perkembangan koperasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian, tingkat partisipasi anggota rendah, kurang dedikasi pengurus dan pengawas terhadap kelangsungan hidup koperasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, dalam kepengurusan masih terdapat pembagian tugas yang kurang jelas, pengurus kebanyakan sudah lanjut usia.

Saran hasil penelitian : (1).Pembinaan berupa pelatihan maupun pendampingan bagi para pengurus dan pengelola koperasi perlu ditingkatkan, sehingga koperasi dapat dikelola secara professional. (2). Pengenalan koperasi kepada masyarakat sebaik dikenalkan sejak dini, agar masyarakat mengerti dan

memahami manfaat dari koperasi sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di koperasi dengan baik.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Perkembangan Koperasi

ABSTRACT

Implementation of regional autonomy laws, will mem-berikan positive impact on the cooperative in terms sum-ber allocation of natural resources and other advisory services. However Kope constellation will increasingly face the problem more intensive de-ngan local governments in the form of placement inves-tasi location and scale of activities of the cooperative. Because the principle of efficiency will be urged cooperatives to build an extensive network and may be beyond the limits of the autonomous region. Role advo-kasi by the cooperative movement to orient kepa-da government in the increasingly important area. Dean of the Faculty of Business Administration University of Nebraska Gaay Schwediman, found for the progress of the cooperative, the traditional management needs to be replaced with modern management that has characteristics as follows all members are treated fairly, supported the administration sophisticated, cooperatives of small and weak can join (merger) in order to be cooperative stronger and healthier, the manager was always concerned about the function of planning and strategic issues, business decisions are made based on a belief to the concerned organization in the long run, education became one of the members of the regular program to be implemented. From this study, the authors formulate the problem as follows: (1). What is the role of local governments in the development of cooperatives in Kendal? (2). Factors - factors that support and hinder the development of cooperatives in Kendal?

This study used a qualitative approach. The instrument of this study is the researchers themselves. The data source, informant is a person who is used to provide information about the circumstances of the setting. Informants targets are individuals who worked or still in a relationship (interaction) with the employees of the public service sector bureaucracies lower middle class. The informant in this study is a cooperative movement, cooperative management, cooperative members and officials of Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Kendal.

RESULTS: (1). The success of the cooperative in carrying out its role needs to consider the ability of cooperatives to collect and reinvest capital, by way of fertilizing various financial resources of a large number of members, the influence of the cooperative to its members related to a change in attitude and behavior more in line with the changing demands of the environment , While the factors - factors that hinder the development of cooperatives is the lack of public understanding of the cooperatives, the level of member participation is low, less dedication administrators and supervisors on the survival of the cooperative, human resources are inadequate, the management is still a division of tasks that are less obvious, administrators mostly been Elderly.

Suggestions results of the study: (1) .Pembinaan the form of training and mentoring for the administrators and managers of cooperatives needs to be improved, so that cooperatives can be managed professionally. (2). The introduction of the cooperative to the community as well as be introduced early, so that people know and understand the benefits of co-operatives so that they can use the existing facilities at the cooperative well.

Keywords: The Role of Local Government, Cooperative Development

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang ”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“ Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat ”.

Menurut Ryaas Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga

ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (dalam Haryanto dkk., 1997:73). Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36-37) yaitu :

- a. Fungsi Pengaturan, dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaanannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

- b. Fungsi Pelayanan, perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.
- c. Fungsi Pemberdayaan, untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Perbedaan cara pandang pelaksanaan fungsi pemerintah

digambarkan oleh (Pratikno dalam Haryanto, dkk. 1997:41 – 43) dari perspektif liberal dan perpektif sosialis. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan. Fungsi utama pemerintah hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi fungsi pemerintahan sebagai fungsi “*sisa*” yaitu fungsi-fungsi penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak di luar pemerintah. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup diawali dari tanggungjawab individu, naik ke tingkat kelompok atau unit sosial yang kecil, pemerintah lokal yang paling rendah selanjutnya bergulir ke atas. Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kesempurnaan mekanisme pasar yang dipercaya akan mampu mencapai efisiensi, akan terganggu. Kedua, dianggap memperkecil kebebasan

individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menentukan kepentingan dan pilihannya sendiri, pada akhirnya dianggap membahayakan demokrasi. Sedangkan perspektif sosialis menganggap bahwa penetrasi pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa keperluan individu dan masyarakat mutlak dibutuhkan. Bagi mereka mekanisme pasar tidak bisa diandalkan menjamin tercapainya efisiensi. Mereka berasumsi bahwa persaingan bebas dalam mekanisme pasar menciptakan ketimpangan distribusi kesejahteraan, sebab kemampuan setiap orang untuk bersaing berbeda-beda. Akibatnya mereka yang kuat memenangkan persaingan dan akan memunculkan kemungkinan terjadinya praktek eksploitasi.

Secara harfiah Koperasi yang berasal dari bahasa Inggris Cooperation terdiri dari dua suku kata **Co** yang berarti bersama dan **Operation** = bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi. Pengertian pengertian pokok tentang Koperasi :

1. Merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama;
 2. Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi;
 3. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil;
 4. Pengawasan dilakukan oleh anggota;
 5. Mempunyai sifat saling tolong menolong;
 6. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.
- Menurut M.G. Suwarni Dosen FE Universitas Janabadra Yogyakarta, tolak ukur keberhasilan suatu koperasi dalam melaksanakan perannya dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
- a. Keberhasilan koperasi sebagai badan usaha, meliputi :
 - Jenis anggota, jumlah anggota, dan jumlah anggota yang aktif serta benar-benar ikut memiliki koperasi (jumlah anggota yang berkualitas);
 - Jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta kesadaran anggota untuk membayarnya. Simpanan-simpanan tersebut merupakan

komponen modal sendiri bagi koperasi;

- Besarnya SHU dan distribusi SHU kepada anggota. Semakin adil pendistribusian SHU kepada anggota berarti koperasi tersebut semakin berhasil;
 - Besarnya modal, asal modal, dan jenis pemilik modal. Koperasi yang memiliki modal besar tetapi jumlah anggotanya sedikit bisa dibilang bukan koperasi.
- b. Keberhasilan koperasi sebagai gerakan ekonomi, meliputi :
- Jasa pelayanan yang diberikan koperasi, sehingga usaha koperasi lebih maju;
 - Peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi.
- c. Keberhasilan ekonomi sebagai sistem ekonomi, meliputi :
- Kerja sama yang baik dengan organisasi-organisasi lain, tanpa persaingan dalam melaksanakan usahanya;
 - Koperasi semakin dapat dipercaya, tanpa harus dikendalikan secara ketat oleh pemerintah;
 - Peningkatan peran serta koperasi sejajar dengan BUMN dan

perusahaan-perusahaan swasta dalam kebijakan-kebijakan, termasuk kepemilikan saham BUMN dan perusahaan swasta oleh koperasi.

Sedangkan sehat atau tidaknya suatu koperasi dilihat dari segi yaitu :

- a. Kesehatan organisasinya, dilihat dari rapat anggota dan badan pengurus yang optimal;
- b. Kesehatan mentalnya, dilihat dari tanggung jawab para anggota dan badan pengurus;
- c. Kesehatan usahanya, dilihat dari pengelolaan koperasi yang berlandaskan azas serta prinsip-prinsip dasar koperasi.

Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan

- masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
 5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

Menurut Undang – undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Dalam setiap kegiatan koperasi telah diatur dalam Undang – Undang yang telah dibuat oleh pemerintah seperti dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:

- a. Memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi ;
- b. Melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap

koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya ;

- c. Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I), pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil cukup memuaskan. Selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif atau institusional koperasi juga berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri. Pilar-pilar tersebut meliputi antara lain : BANK BUKOPIN, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Jasa Audit, dan Institut Koperasi Indonesia (**IKOPIN**). Meskipun demikian, pembangunan koperasi selama PJP I masih jauh dari sempurna dan terdapat kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Kelemahan-kelemahan mendasar itu misalnya adalah : kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan permodalan, dan kelemahan pemasaran. Selain itu, iklim usaha yang ada juga terasa masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi.

Akibatnya, walaupun secara kuantitatif dan kualitatif koperasi telah mengalami perkembangan, namun perkembangannya tergolong masih sangat lambat. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi dalam Pelita VI secara terinci adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat ;
- b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional;
- c. Peningkatan koperasi di dukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan;
- d. Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan

perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan;

Telah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk koperasi, namun peran pemerintah ini tidak dapat terwujud hanya dengan pemerintah saja, tetapi peran masyarakat juga sangat diperlukan agar apa yang direncanakan pemerintah dapat terwujud. Pemerintah melakukan hal tersebut juga untuk masyarakatnya agar menjadi lebih baik lagi kehidupannya, mengurangi pengangguran, menaikkan taraf hidup. Setelah masyarakat dan pemerintah bergotong royong untuk menjalankan peranannya masing-masing tidak akan ada lagi hambatan untuk perkembangan koperasi, dengan peranan koperasi yang terlihat seperti tidak ada artinya namun peranan yang tidak ada artinya itulah yang akan berubah menjadi ada artinya. Dalam hal ini yang tadinya koperasi dianggap sebelah mata dan tidak mempunyai peranan besar untuk negara akan berubah menjadi mempunyai peranan yang besar jika peran pemerintah dan masyarakat untuk koperasi dijalankan. Adapun jumlah koperasi dapat dilihat dari tabel berikut :

JUMLAH KOPERASI DI KABUPATEN KENDAL

TAHUN	KOPERASI AKTIF	KOPERASI TIDAK AKTIF	JUMLAH KOPERASI
2011	263	264	527
2012	277	258	535
2013	298	240	538
2014	392	163	555
2015	407	163	570
2016	425	164	589

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2016
(Ket: Tahun 2016 / bln April 2016)

Secara umum masalah yang dihadapi koperasi adalah : koperasi jarang peminatnya, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, banyaknya pesaing usaha yang sejenis, keterbatasan modal, rendahnya partisipasi anggota dan manajemen koperasi yang belum teratur. Keberadaan koperasi di Kabupaten Kendal dapat menanamkan jiwa dan semangat koperasi serta bertujuan untuk menciptakan kader-kader koperasi yang tangguh dan dapat memahami, menghayati serta memperjuangkan perkoperasian di Indonesia. Ketika suatu tujuan dapat dilaksanakan dengan baik melalui sebuah usaha keras dengan berbagai banyak faktor pendukung yang mempengaruhinya, maka koperasi tersebut dapat dikatakan sudah mencapai sebuah keberhasilan, dan keberhasilan itulah yang akan menjadi tolak ukur kepada koperasi-koperasi lainnya untuk terus berpacu agar dapat mencapai sebuah

keberhasilan yang sama seperti koperasi lainnya. Menurut tokoh koperasi Ibnu Soedjono, untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, kita perlu menggunakan tolak ukur keberhasilan koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi.

Pendekatan dari sudut perusahaan meliputi :

a. Peningkatan anggota perorangan

Pada dasarnya lebih penting jumlah anggota perorangan daripada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Ada dua faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota. Kemampuan ekonomi anggota penting karena dapat digerakkan untuk menyusun investasi, sedangkan kecerdasan anggota sangat menentukan mutu manajemen yang sifatnya partisipatori dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dengan satu anggota satu suara.

b. Peningkatan modal

Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam

berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Indikator kemandirian yang lain adalah keberanian manajemen untuk mengambil keputusan sendiri.

c. Peningkatan volume usaha

Semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi khususnya yang berasal dari anggota.

d. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat

Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada koperasi. Bentuk pelayanan dapat bermacam-macam, misalnya: pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan dari sudut efek koperasi meliputi :

- a. Produktivitas artinya koperasi dengan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti: biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya.
- b. Efektivitas, dalam arti mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya.
- c. Adil, dalam melayani anggota-anggota, tanpa melakukan diskriminasi.
- d. Mantap dalam arti bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di tempat lain yang dianggap lebih baik.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif dengan penjelasan secara kualitatif. Deskriptif karena peneliti hanya semata-mata ingin melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistic. Menurut Afiifudin (2009:57) yaitu bahwa :

“ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.“

Sumber data, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan target adalah individu yang bekerja atau masih menjalin hubungan (interaksi) dengan pegawai-pegawai birokrasi sektor pelayanan publik golongan menengah ke bawah. Adapun dalam penelitian ini informannya adalah gerakan koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal.

HASIL PENELITIAN

Peran pemerintah daerah dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan

- konsultasi terhadap permasalahan koperasi ;
- b. Melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya ;
 - c. Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama

Hasil penelitian lapangan ini disusun dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Sedangkan sistem penyajian hasil penelitian ini pun disusun berdasarkan peran pemerintah daerah dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal dan faktor – faktor yang mendukung serta menghambat dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya / masyarakat akan tetapi dalam menjalankan tugasnya tentu saja koperasi memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi maju atau tidaknya Koperasi. Perkembangan usaha koperasi merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan maju, begitu juga dengan badan usaha koperasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kesejahteraan

anggota dan mengembangkan usahanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 43 lapangan usaha koperasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- b. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- c. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Adapun faktor – faktor pendukung dalam perkembangan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal antara lain sebagai berikut :

- a. Partisipasi Anggggota, merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan.
- b. Solidaritas Antar Anggota Koperasi, sebagai upaya membangun ikatan

solidaritas antar anggota, karena dengan ikatan ekonomi, ikatan solidaritas bisa dibangun secara lebih kongkrit. Adanya solidaritas yang kuat antar anggota koperasi dapat menjadi suatu kekuatan didalam mencapai tujuan koperasi.

- c. **Pengurus Koperasi Yang Juga Tokoh Masyarakat**, pengurus koperasi yang juga tokoh dalam masyarakat sehingga rangkap jabatan ini menimbulkan fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh pengurus koperasi menyebabkan kurang profesionalismenya pengurus dalam mengelola koperasi.
- d. **Skala Usaha**, karena kemampuan pemasaran yang masih terbatas pada beberapa jenis komoditi, dan belum terbinanya jaringan dan mata rantai pemasaran prduk koperasi secara terpadu menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang. Dapat disimpulkan bahwa dengan skala usaha yang kecil yang dilaksanakan oleh koperasi menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang.
- e. **Perkembangan Modal**, dalam koperasi sangat mempengaruhi perkembangan

usaha koperasi karena dengan modal yang cukup besar koperasi dapat mengembangkan usahanya yang lebih banyak lagi. menyatakan bahwa apabila koperasi ingin mengembangkan usahanya kepasar global maka koperasi membutuhkan modal yang banyak, karena di pasar global terdapat resiko bisnis yang cukup tinggi. Bahwa kebanyakan koperasi belum mampu menggalang pemupukan modal dari anggota koperasi sendiri selain dari iuran pokok dan iuran wajib anggota.

- f. **Ketrampilan Manajerial**, dengan kualitas sumber daya insani dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh koperasi yang bersangkutan. Ketrampilan manajerial di koperasi sangat penting karena organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manajemen yang baik koperasi tidak akan berkembang tanpa fungsi pengaturan yang terarah. Dan dalam perencanaan program kerja koperasi harus mampu diterjemahkan oleh tim manajemen berdasarkan kesepakatan di dalam rapat anggota tahunan (RAT).
- g. **Jaringan Pasar**, merupakan suatu tempat untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas agar dapat memperoleh keuntungan

yang lebih besar. Bahwa Pelayanan koperasi umumnya terfokus pada internal koperasi yang belum terbentuk jaringan antar koperasi. Koperasi akan lebih berdaya saing jika koperasi mampu membentuk jaringan usaha.

- h. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia, koperasi umumnya dikelola oleh tim manajemen dengan status pendidikan yang tidak begitu tinggi, sehingga kemampuan manajerialnya juga kurang memadai.
- i. Pemilikan dan Pemanfaatan Perangkat Teknologi Produksi dan Informasi, masih ditemukan koperasi yang belum memiliki akses terhadap alat-alat komunikasi modern seperti jaringan internet. Banyak yang masih menggunakan mesin ketik sehingga cukup lamban dalam memberikan berbagai pelayanan kepada anggota.
- j. Sistem manajemen, dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, melimpahkan wewenang kepada manajer.
- k. Kinerja Pengurus, pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang

sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena itu kinerja pengurus mempunyai kedudukan yang menentukan keberhasilan koperasi. Dengan pengurus yang memiliki kompetensi yang baik akan dapat membuat koperasi berkembang menjadi lebih baik.

2. Faktor eksternal, yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi antara lain :

- a. Komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan dikuasainya sebagian besar asset usaha nasional oleh sebagian kecil kelompok usaha besar. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah disini koperasi masih dapat perhatian yang kecil.
- b. Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan.
- c. Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi, manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum sepenuhnya

dapat dikatakan baik. Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota, meningkatkan kemampuan manajerial. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting. Karena dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat memajukan koperasi.

- d. Iklim pendukung perkembangan koperasi.
- e. Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak dapat datang begitu saja. Untuk itu pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi.
- f. Koperasi berkembang mengikuti perkembangan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sehingga seakan-akan koperasi adalah organisasi yang sekedar menjalankan program-program pemerintah.
- g. Tingkat harga yang selalu berubah (naik) menyebabkan pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan

usaha, justru menciutkan usaha. Permasalahan diatas adalah merupakan faktor ancaman dan kelemahan koperasi baik internal dan eksternal. Berbagai kendala dan tantangan tersebut menyebabkan koperasi belum mampu berfungsi dan berperan sesuai harapan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Drs. Agustinus Teguh Imanto sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi, menyatakan sebagai berikut :

“ Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi, dengan partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang – orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi”. (Hasil wawancara tanggal 13 Februari 2015).

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ibu Chatarina S sebagai Ketua KSU Barokah Kecamatan Limbangan mengatakan sebagai berikut :

“Bentuk dari partisipasi anggota koperasi adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota (kehadiran, keaktifan,

penyampaian pendapat), partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, penyertaan modal), serta partisipasi pemanfaatan pelayanan)”. (Hasil wawancara tanggal 17 Februari 2015).

Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa perkembangan usaha koperasi didasarkan pada peran aktif anggota didalam koperasi bukan hanya bertumpu kepada pengurus, serta perkembangan usaha koperasi juga dipengaruhi peranan pemerintah dan juga masyarakat baik sebagai anggota koperasi ataupun sebagai anggota masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi tersebut. Selain itu juga harus meningkatkan SDM dengan kualitas yang baik dari segi pengetahuan, kemampuan dan moral para anggotanya, kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan koperasi, manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis, memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya, memperhatikan manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang

dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas, keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. Apabila koperasi dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya maka koperasi dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik agar koperasi dapat selalu berkembang.

Dalam perkembangan koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kendal di tahun 2012 mendapatkan penghargaan PIN EMAS dari Gubernur Jawa Tengah, tahun 2013 mendapatkan penghargaan PATAKA dari Menteri Koperasi dan UKM RI, tahun 2014 mendapatkan penghargaan Satya Lacana dari Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudoyono atas keberpihakan Bupati Kendal terhadap koperasi. Selain faktor – faktor pendukung perkembangan koperasi terdapat juga faktor – faktor penghambat dalam perkembangan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Menurut Ace Partadiredja

Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah

rendahnya tingkat kecerdasan rakyat Indonesia.

2. Menurut Baharuddin

Faktor penghambat dalam perkembangan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa koperasi sehingga harus diperbaiki lagi.

3. Menurut Prof.Wagino

Faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerjasama di bidang ekonomi dari masyarakat, kerjasama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi.

Ketiga masalah di atas merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Ada tiga hambatan eksternal utama yang dapat mempengaruhi perkembangan koperasi, yakni sebagai berikut :

- a. Keterlibatan pemerintah yang berlebihan (yang sering kali karena desakan pihak donor).
- b. Terlalu banyak yang diharapkan dari koperasi atau terlalu banyak fungsi yang dibebankan kepada koperasi melebihi fungsi atau tujuan koperasi sebenarnya.
- c. Kondisi yang tidak kondusif, seperti distorsi pasar, kebijakan ekonomi seperti misalnya kebijakan proteksi yang anti-pertanian, dan sebagainya.
- d. Kurangnya kerjasama pada bidang ekonomi dari masyarakat kota sehingga koperasi semakin terkucilkan.

Sedangkan, hambatan internal yang dapat mempengaruhi dalam perkembangan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan anggota atau partisipasi anggota
- b. Penurunan kinerja pengurus koperasi. Dalam hal ini dapat disebabkan sebagai berikut :
 - Masih kuatnya budaya nepotisme yang secara tidak sadar diyakini sebagai wujud azas kekeluargaan.

- Belum adanya *performance measure* (ukuran prestasi) para pengurus koperasi secara jelas.
 - Masih rendahnya profesionalisme dan spesialisasi tugas.
 - Lambannya proses adopsi dan adaptasi teknologi maju.
- c. Kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya, serta belum berfungsinya secara penuh mekanisme kerja antar pengurus dengan pengelola koperasi.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa secara lembaga koperasi belum memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam menciptakan kemakmuran bersama seperti yang dicita-citakan. Peran pemerintah sangat penting dalam pembinaan koperasi agar berkembangnya basis ekonomi wilayah di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan pedesaan, meluasnya kesempatan usaha dan keadilan bagi rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Tujuannya agar tidak akan terjadi pemusatan asset ekonomi produktif pada segelintir orang atau golongan, karena koperasi merupakan kelompok pelaku ekonomi dalam perekonomian dan menjalankan usahanya agar mampu menghadapi masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator

pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi dan merupakan sokoguru perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Adapun Program - program koperasi dalam kebijaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi :

- a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, manajer, karyawan, anggota badan pemeriksa, kader koperasi dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL);
- b. Bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib organisasi terutama dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi;
- d. Meningkatkan kemampuan penerapan sistem akuntansi koperasi;
- e. Meningkatkan kemampuan pengawasan internal koperasi primer;
- f. Meningkatkan partisipasi aktif anggota;
- g. Penyediaan informasi usaha;

- h. Pelaksanaan kegiatan praktik kerja atau magang bagi para pengelola usaha KUD;
- i. Pelaksanaan kegiatan studi banding bagi para manajer koperasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan;
- j. Penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui pendekatan kelompok;
- k. Penyediaan sarana usaha koperasi dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat sekitarnya di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan dan terisolasi.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah dengan tugas membantu Bupati untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007.

Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Kendal setiap tahunnya mengalami peningkatan (dapat lihat dalam tabel 1 Bab I), namun penyelenggaraan pembinaan koperasi belum dilaksanakan dengan optimal. Dalam hal ini dapat dilihat data perkembangan koperasi sampai dengan tahun 2014 bahwa jumlah koperasi sebanyak

555 koperasi, koperasi aktif berjumlah 392 unit, yang tidak aktif berjumlah 163 unit, sedangkan koperasi yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 132 unit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah dalam perkembangan koperasi khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal ditemukan beberapa hambatan – hambatan. Berbagai hambatan tersebut timbul berasal dari beberapa faktor baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Hal ini memungkinkan masih belum tercapainya optimalisasi dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal. Faktor – faktor internal yang menghambat perkembangan koperasi antara lain:

a. Dari Sisi Kelembagaan Koperasi

1. Keanggotaan dalam Koperasi

Keadaan keanggotaan ditinjau dari segi kuantitas tercermin dari jumlah anggota yang semakin lama semakin berkurang. Masalahnya keanggotaan koperasi yang ada sekarang belum menjangkau bagian terbesar dari masyarakat. Ditinjau dari segi kualitas masalah keanggotaan koperasi tercermin dalam :

- Tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah;

- Ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas;
- Sebagian dari anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota;
- Partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan. Apabila suatu koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) banyak anggotanya yang tidak hadir.
- Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak utang kepada koperasi, hal ini menyebabkan modal yang ada dikoperasi semakin berkurang.

2. Pengurus Koperasi

- Pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum memadai;
- Pengurus belum mampu melaksanakan tugas mereka dengan semestinya;
- Pengurus kurang berdedikasi terhadap kelangsungan hidup koperasi;
- Dalam kepengurusan koperasi sampai saat ini masih belum ada pembagian tugas yang jelas;

- Pengurus koperasi kebanyakan yang sudah lanjut usia dan para tokoh masyarakat yang sudah memiliki jabatan ditempat lain;
- Pengurus masih belum mampu berkoordinasi dengan anggota, manajer, pengawas, dan instansi pemerintah dengan baik

3. Pengawas Koperasi

Sebagian anggota dari badan pengawas koperasi banyak yang belum berfungsi. Hal ini disebabkan oleh :

- Kemampuan anggota pengawas yang belum memadai;
- pembukuan koperasi biasanya belum lengkap dan tidak siap untuk diperiksa;

b. Dari Sisi Bidang Usaha

Masalah usaha koperasi dapat digambarkan sebagai berikut : ada koperasi yang manajer dan karyawannya belum memenuhi harapan, masih banyak ditemukan administrasi koperasi yang belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan dengan baik, sistem informasi manajemen koperasi masih belum berkembang sehingga pengambilan keputusan belum didukung dengan informasi yang cukup lengkap dan dapat diandalkan.

c. Dari Sisi Produksi

Koperasi sering mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh adalah modal. Dalam hal kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga secara relatif kalah dengan output industri besar. dalam banyak kasus, output koperasi (dan UKM) tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk dipasarkan.

Sedangkan masalah eksternal yang menghambat dalam perkembangan koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
- b. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.
- c. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.

Selain hal tersebut diatas, hambatan lain adalah kurangnya pemahaman tentang perkoperasian dari masyarakat itu sendiri,

banyaknya identitas koperasi yang tidak jelas, sehingga tidak dapat diklasifikasikan apakah koperasi tersebut masih aktif ataupun tidak aktif sebagai contoh masih terdapat koperasi tidak aktif yang sampai sekarang sudah tidak ditemukan keberadaan pengurus, pengawas serta alamatnya. Hasil wawancara dengan ibu Eni Puji Hastuti Handayani, SE, MM sebagai Kepala Seksi Pengawasan Koperasi, menyatakan sebagai berikut :

“ Sumber daya manusia di Bidang Koperasi saat ini masih terbatas sehingga dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pada koperasi sering tumpang tindih “. (Hasil wawancara tanggal 13 Februari 2015).

Hal senada dikuatkan wawancara dengan Bapak Ahmad Roji'un Ketua Koptan Wahyu Gondang Makmur Kecamatan Limbangan sebagai berikut :

“ Pada awal pendirian Koptan Wahyu Gondang Makmur partisipasi anggota cukup tinggi, kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun terbitnya badan hukum koperasi tahun 1999, partisipasi anggota mengalami penurunan drastis dan mengakibatkan koperasi tidak aktif sampai dengan tahun 2013. Kami selaku pengurus

kebingungan apakah koperasi ini akan dihidupkan kembali atau dibiarkan mati suri. Dalam kurun waktu 14 tahun tidak ada kunjungan ataupun pembinaan untuk koperasi yang kami jalankan. Kemudian pada awal tahun 2013 baru diadakan verifikasi koperasi tidak aktif. Setelah diadakan pembinaan kami semua sepakat agar Koptan Wahyu Gondang Makmur ini bisa diaktifkan kembali sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .” (Hasil wawancara tanggal 17 Februari 2015).

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan koperasi belum dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan, pembinaan hanya dilakukan pada awal berdiri koperasi (perolehan status Badan Hukum Koperasi) dan setelah kegiatan koperasi berjalan tidak dilakukan monitoring secara periodik sehingga banyak koperasi tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak menjalankan kegiatannya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi, tidak tersedianya data koperasi yang akurat yang menggambarkan alamat koperasi, jenis usaha koperasi dan pembinaan apa saja yang sudah dilakukan terhadap masing-masing Koperasi dan rasio

jumlah pegawai dengan jumlah koperasi yang dibina tidak seimbang, dan sarana dan prasana untuk melakukan pembinaan serta kompetensi pegawai pembina masih kurang memadai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal tetapi belum optimal karena kegiatan tersebut belum terlaksana bagi seluruh koperasi yang ada. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan agar perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal dapat dipantau seluruhnya. Sedangkan faktor – faktor yang menghambat perkembangan koperasi dapat dilihat dari dua faktor yakni faktor internal diantaranya keterbatasan anggota atau partisipasi anggota, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian, penurunan kinerja pengurus koperasi serta kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal adalah iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan

pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan serta banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.

Rekomendasi

- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal bertujuan untuk monitoring kepada Koperasi yang tidak aktif dan kepada koperasi yang aktif tetapi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan cara turun ke lapangan, memonitor penyebab Koperasi yang tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT sehinggadapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi sehingga kedepannya dapat diberikan solusi dan perbaikan.
- Pembinaan baik, berupa pelatihan maupun pendampingan bagi para pengurus dan pengelola koperasi perlu ditingkatkan, sehingga koperasi dapat dikelola secara professional.
- Pengenalan koperasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami manfaat koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 2002. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES. Jakarta.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soetjipto.2015. *Mengembangkan Koperasi*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta. Bandung.
- Suryabrata. Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal.
- Pasal 33 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945.
- Perubahan ke 4 Undang – Undang Dasar 1945.